

## SERTIFIKAT

Diberikan kepada

Nama : Fauzan Effendi AM, A.Md

Instansi : Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto

NIP : 19840417 200902 1 007

Yang Telah Mengikuti Bimbingan Teknis

"TATACARA PENYUSUNAN NERACA AWAL DAN NERACA AKHIR SKPD/KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/SATKER SERTA
PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT/DAERAH, LAKIP, SISTEM AKUNTANSI HIBAH DAN PENGELOLAAN BMN/BMD SESUAI
DENGAN PP NO. 24/2005 (SAP), PERMENDAGRI NO. 13/2006 DAN NO. 59/2007, PERMENKEU NO. 171/2007 DAN NO. 40/2009".

Diselenggarakan oleh : Kerukunan Pensiunan Departemen Keuangan (KPDK) Pusat Pada Tanggal 18 dan 19 Mei 2010 di Hotel Golden Flower Bandung Bandung, 19 Mei 2010

PANITIA PENYELENGGARA BIMBINGAN TEKNIS

Ketua Umum KPDK Pusat,

ruou

Sekretaris Umum KPDK Pusat,

Ørs. H. R. Djokomartono

Drs. Hussein Kartasasmita

Mengetahui Pengajar/Instruktur,

Kementerian Keyangan,

Deddy Candra, SST., Ak.

NIP. 060095075

Pas Photo

## DAFTAR MATERI DAN PENGAJAR/INSTRUKTUR

NO.	MATERI	PENGAJAR/INSTRUKTUR
1	PEMBUKAAN MATERI BIMBINGAN TEKNIS	
	1. POKOK-POKOK NERACA SKPD/KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/SATKER.	Deddy Candra, SST., Ak.
	2. AKUNTANSI PENYUSUNAN NERACA AWAL/AKHIR SKPD/KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/SATKER.	( Kementerian Keuangan )
1.0	3. JURNAL DAN RECEK AKUN NERACA.	
	a. Persamaan Akuntansi.	
	b. Saldo Normal. c. Basis Akuntansi.	
	d. Jurnal Pasangan Neraca.	0.7% 热度压缩形型加速器
	4. SIMULASI PROSES AKUNTANSI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD/KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/SATKER.	Deddy Candra, SST., Ak. ( Kementerian Keuangan )
	5. SISTEM AKUNTANSI HIBAH SESUAI DENGAN PMK NO. 40/2009.	
	6. SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT/DAERAH.	
	7. LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP).	
	8. TATACARA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH.	
	9. TATACARA REKONSILIASI BMN/BMD DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SESUAI DENGAN PMK. NO. 102/2009.	Deddy Candra, SST., Ak. ( Kementerian Keuangan )
	10. PEDOMAN PELAKSANAAN INVENTARISASI, PENILAIAN DAN PELAPORAN DALAM RANGKA PENERTIBAN BMN/BMD SESUAI DENGAN PMK. NO. 109/2009.	
	11. SISTEM PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH.	